**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN BANGKALAN**

**Haryadi**

Pendidikan Kewarga Negaraan

E-mail: <mailto:aryanimanarya@gmail.com>

**Abstrak:**

Fenomena sampah di Kabupaten Bangkalan terus meningkat seiring pertambahan jumlah penduduk. Munculnya Peraturan Daerah Kota Bangkalan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah merupakan bentuk upaya pemerintah Kota Bangkalan dalam menunjukkan keseriusannya untuk pengelolaan sampah.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah di Kota Bangkalan beserta faktor penghambatnya. Metode penelitian ini adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi serta hasilnya dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Bangkalan Timur kurang terlaksana. Hal ini disebabkan karena dari segi komunikasi, sosialisasi atas pengurangan sampah berhenti di tahun 2020. Konsistensi juga masih minim karena belum adanya upaya ketegasan penerapan sanksi administrasi bagi pelaku usaha yang tidak membayar retribusi maupun masyarakat yang membuang sampahnya di TPS liar. Dari segi sumber, sebagian besar SDM pelaksana kebijakan ini khususnya untuk pengawas hanya memiliki tingkat pendidikan SLTP dan SLTA sederajat sementara untuk di DLH sendiri minimnya pengalaman serta pegawai yang berlatar belakang pendidikan dari bidang teknik lingkungan. Anggaran yang terbatas menyebabkan pengadaan mesin untuk daur ulang sampah sulit direalisasikan, mengingat harga untuk per unitnya yang relatif mahal dan belum memungkinkan untuk diberikan kepada seluruh kelurahan di Kecamatan Bangkalan Timur. Sarana dan prasarana juga terbatas seperti banyaknya unit armada yang kondisinya rusak, TPS di beberapa kelurahan volume daya tampung sampahnya juga terbatas. Dari segi disposisi, sikap pelaksana sudah menunjukkan komitmen dan kejujuran. Dari segi struktur birokrasi, adanya SOP terkait pengelolaan sampah dan fragmentasi yang melibatkan DLH, Kecamatan hingga masyarakat di kelurahan. (2) Faktor penghambat terdiri dari rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pembuangan sampah, kurangnya ketegasan penerapan sanksi, minimnya sumber daya manusia, dan keterbatasan anggaran.

**Kata kunci:** *Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Sampah.*

**Abstract:**

The phenomenon of waste in Bangkalan District continues to increase along with the increase in population. The emergence of the Bangkalan City Regional Regulation Number 11 of 2020 concerning waste management is a form of the Bangkalan City government's effort to show their seriousness for waste management. The purpose of this study was to determine the implementation of government policies in waste management at Bangkalan District, Bangkalan City and their inhibiting factors. This research method is qualitative, with data collection techniques used observation, interviews and documentation and the results are analyzed by descriptive qualitative. The results shown: (1) The implementation of government policies in waste management at Bangkalan Timur District, Bangkalan City was not implemented enough. This is because in terms of communication, socialization on waste reduction stopped in 2020. Consistency is also still minimal because there is no firm effort to apply administrative sanctions for business actors who do not pay retribution or people who dispose of their waste in illegal TPS. In terms of resources, most of the human resources implementing this policy, especially for supervisors, only have a junior high and senior high school education level, while in DLH itself there is a lack of experience and employees with an educational background in the field of environmental engineering. The limited budget makes it difficult to procure machines for recycling waste, given the relatively high price per unit and not yet possible to provide it to all kelurahan in Bangkalan Timur District. Facilities and infrastructure are also limited, such as the number of fleet units that are in a damaged condition, TPS in several urban villages and the volume of waste capacity is also limited. In terms of tendencies, the attitude of the implementers has shown commitment and honesty. In terms of bureaucratic structure, there are SOPs related to waste management and fragmentation involving DLH, sub-districts to the community in the village. (2) Inhibiting factors consist of low public awareness of waste disposal, lack of firmness in the application of sanctions, lack of human resources, and budget constraints.

**Keywords:***Policy Implementation, Waste Management.*

**PENDAHULUAN**

P

ada saat ini di Indonesia sampah masih sebagai bahan sisa yang tidak diinginkan keberadaannya dan bukan sebagai sumberdaya daya yang dimanfaatkan. Hal tersbut dapat terlihat dari semakin banyaknya sampah yang menumpuk di temmpat pembuangan akhir (TPA). Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpuk pada pembuangan akhir sudah saatnya di ganti dengan memandang sampah sebagai sumber daya yang dapat di manfaatkan dengan teknologi pengelolaan sampah. Secara eksplisit kebijakan pengelolaan sampah tertuang dalam peraturan dalam peraturan presiden No 35 tahun 2018 tentangan percepatan pembangunan instalasi pengelolaan sampah menjadi energi listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Bangkalan merupakan salah satu kota yang berada di pulau Madura. Kota yang terletak di ujung barat pulau madura, kerap kali disebut dengan kota dzikir dan shalawat. letak kota Bangkalan sangat strategis karena berdekatan jaraknya yang tidak terlalu jauh dari Pelabuhan Kamal dan juga jembatan penyebrangan yaitu jembatan Suramadu. Dari hal tersebut, Bangkalan menjadi salah satu kota sebagai tempat lalu lalang banyak orang untuk melakukan aktivitasnya. Perda Kabupaten Bangkalan nomor 5 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah tertuliskan pada pasal 5 bahwasanya pemerintah daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Dari peraturan daerah tersebut sudah jelas bahwasanya, dari pihak pemerintah sudah melakukan upaya untuk mengurangi terkait tumpukan sampah di Bangkalan.

Jumlah penduduk kabupaten bangkalan termasuk dalam kategori besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi serta kecenderungan masyarakatnya. yang semakin konsumtif telah menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam. keberagaman jenis dan karakteristik sampah tersebut antara lain berupa sampah kemasan yang berbahaya dan/atau sulit diurai oleh proses alam. Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara padu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat serta tugas dan wewenang Pemerintah Kabupaten untuk melaksanakan pelayanan publik, maka perlu dibentuk peraturan daerah tentang pengelolaan sampah di Kabupaten bangkalan. Harapan dari adanya pengaturan tentang pengelolaan sampah ini adalah untuk dapat memenuhi hak setiap orang (penduduk) dalam mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai dengan amanat Pasal 28H ayat (1) undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah di kabupaten Bangkalan ini adalah dalam rangka melaksankan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pedekatan kualitatif karna dengan mendeskripsikan implementasi kebijakan pengeloaan sampah di DLH (Dinas Lingkungan Hidup) peneliti dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis/observasi. Dan menggunakan landasan teori yang dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori ini juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

Sumber data merupakan keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan sebagai dasar kajian (analisis atau kesimpulan. Dalam penelitian ini, pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah data Primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung dari sumbernya, data primer bisa disebut juga dengan data asli. Data Sekunder, yaitu data yang didapat sebagai bahan pendukung data primer. Data Primer yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah edata tertulis yang diperoleh dari buku-buku, jurnal dan sumber-sumber retrensi yang berhubungan dengan penelitian ini. Subjek penelitian menggunakan *convinient sampling* yakni dengan mengambil kasus yang terbaru. Rasionalisasi dari subjek penelitian yaitu berdasarkan subjek yang telah terjdi di daerah tersebut, jarak tempuh dinas terkait dengan peneliti dekat, dan mendapatkan respon baik. Penelitian ini dilaksanakan di dinas lingkungan hidup kabupaten bangkalan, yang terletak di Jl. Soekarno Hatta No. 32b, Wr 08, Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan Jawa Timur 69166. Dinas lingkungan hidup ini merupakan yang mengelola dan menangani dalam keadan lingkupan di kabupaten bangkalan dalam siklus tahun 2022 / 2023.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hasil dari penelitian ini adalah membahas tentang diinas Lingkungan Hidup merupakan suatu Lembaga Daerah yang dibentuk dengan peraturan Bupati Bngkalan nomor 23 tahun 2019 tantang pembentukan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis Daerah pengelolan sampah dan peraturan Daerah nomor 5 tahun 2021 tentang pengelolan sampah. Salah satu wujud nyata pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan dengan diterbitkannya peratiuran daerah Kota Bangkalan nomor 5 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah. Secara garis besar, isi dalam kebijakan ini memuat dua hal yaitu penanganan sampah dan pengurangan sampah. Adanya sebuah kebijakan tidak serta merta dapat langsung mengatasi sebuah permasalahan sampah yang terjadi di Kabupaten Bangkalan, dimana tingkat pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bangkalan yang semakin meningkat, maka perlu ada penanganan melalui metode pengelolaan sampah yang masih menggunakan sistem *open dumping dan TPS3R* kurangnya sarana dan prasarana sehingga tidak bisa mengangkut jumlah sampah yang setiap harinya semakin meningkat dan minimnya sosialisasi atas kebijakan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan terkadang adanya sosialisasi peraturan atau keijakan masih belum maksimal karena sasaran dari sosialisasi kebijakan tidak tepat kepada masyarakat di Kota Bangkalan mengenai proses penyampaian informasi komunikasi kepada komunikan, kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampiakn kepada pelaksana kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung.

**Tabel IV.2. Data Sarana Dan Prasarana DLH Kota Bangkalan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| no | Sarana Dan Prasarana | Jumlah | Kondisi |
| 1 | Truk Sampah | 25 unit | 4 uit rusak |
| 2 | Tangka air | 5 unit | baik |
| 3 | Alat berat | 5 unit | baik |
| 4 | Mobil operasional | 15 unit | 3 unit rusal |
| 5 | Mesin rumput | 20 unit | 5 unit rusak |
| 6 | Mesin pengelola sampah | 20 unit | baik |
| 7 | Alat berat | 5 unit | baik |

**S**umber : DLH Kota Bangkalan,2023

Berdasarkan sarana dan prasarana pada dinas lingkungan hidup masih dapat beberapa kekurang sarana dan prasaran dan juga masih banyak sarana dan prasaran yang masih belom layak dipakai atau butuh yang namanya renovasi. Sarana dalam meningkatkan kaulitas dalam pengelolaan lingkungan hidup masih kurang contoh yang berbasis analisis data/sample yang belum terakreditasi untuk pengujian kualitas air dan udara.

**SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat di buat sebuah kesimpulan tentang Impelemantasi kebijakan pemerintahan daerah terhadap pengelolaan sampah di kabupatan bangkalan masih belom maksimal dalam melaksanakan. Kerena ada beberapa sebab dari segi komonikasi, sosialisai dalam pengurangan sampah tidak maksimal. Konsistensi juga masih minim di sebebkan belom ada ketegasan dalam menerapan administrasi bagi pelaku masyarakat yang tidak membayar retribusi dan tidak ada sanksi atau perda yang mengatur masyrakat yang membuang sampah di pinggir jalan atau bukan pada tempat dan waktu yang sudah di tetapkan oleh dinas lingkungan hidup.

**UCAPAN TERIMA KASIH**

Alhamdulillah dengan memanjatkan puji syukur atas segala nikmat dan karunianya, karya ini penulis persembahkan untuk orang-orang tercinta, Kedua orang tua tercinta, terimaksih atas segala cinta dan telah mensuport anaknya samapi saat ini dalam mencari ilmu dan bimbingabnya serta pengorbanannya tiada batas yang telah kalian berikan kepada saya sehingga saya dapat tumbuh lebih dewasa semoga perkuliahaan ini menjadi lebih baik untuk kedepannya. Keluarga besar saya, semoga kesuksesan, keberkahan, kesehatan dan keselamatan slalu menyertai kita. Bapak M. Sahid, S.H., M.H, sebagai wali dosen saya yag sabar, penyayang dan mebimbing kami serta mensuport kami. Temen-temen seperjuangan Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan angkatan 2019 yang telah bersama-sama selama perkuliahan saling merangkul sehingga kita semua mampu melalui proses perkuliahan sampai tahap akhir ini.

**DAFTAR PUSTAKA**

Agustin,Leo. 2012:149, Dasar-dasar Kebijakan Publik

Djani, W., Wadu, J., & Lake, P. (2019). Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Partisipasi Masyarakat Di Dinas Kebersihan Dan Lingkungan Hidup Kota Kupang. Journal of Business Studies, 4(2), 50–67.

Kencana, N. (2016). Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di kabupaten ogan komering ulu. Jurnal Pemerintahan Dan Politik, 2(1), 17–22.

Maria permata agustini. (2009). “ Implementasi Good Governance Dalam Pengelolaan Sampah .” Kajian Aparatur PKP2A III LAN Samarinda, 2(2), 114–127.

Mundzir, M. (2020). Bank Sampah Gobel Sebagai Alternatif Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Di Lingkungan Kelurahan Sukolilo Tuban. jurnal pengabdian dan Pemberdayan masyarakat, 1–33. <http://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/strategi/article/download/154/137>

Nurdin, Usman. 2002 Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum Jakarta

Sari, W., Rifki, A. M., & Karmila, M. (2020). Analisis Kebijakan Pendidikan Terkait Implementasi Pembelajaran Jarak Jauh Pada Masa Darurat Covid 19. Jurnal MAPPESONA, 17(1), 12.

Sulila, Ismet,(2015) Impelentasi Demensi Layanan Publika Dalama Konteks Otonomi Daerah.A Edisia 2.A Yogyakarta;A Cva Budia Utama.

Sugiono.(2016). Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif, R&D. Bandung Alfabeta.

Wachid, A., & Caesar, D. L. (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Kudus. J-KESMAS: Jurnal Kesehatan Masyarakat, 6(2), 173. <https://doi.org/10.35329/jkesmas.v6i2.1880>.

Winarno, Budi (2016) Teori Dan Proses Kebijakan Pablic. Yogjakarta:Media Pressindo.

Nurman. (2015). Strategi Pembangunan Daerah, edisi 1 cetak 1. Jakarta: Rajawali Press.

Dunn, William N. (2015). Public Policy Analysis (Analisis Kebijakan Publik). Edisi terjemahan. Jakarta: Salemba Humanika.

Tumija, Anwari F. Ramadhan, Dedi Kusmana; 2017; “Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat”. Jurnal Media Birokrasi, Volume 1, Nomor 1, Oktober 2019.

Wahdatunnisa, M. (2019). Pelaksanaan Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran . Jurnal Moderat, Vol. 5, No. 2 Mei 2019. ISSN. 2442-3777.

Batahari, T.D., Kimbal, A., dan Kumayas, N. (2016). Manajemen Pemerintahan Dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kepualauan Sangihe. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 2 April 2016.

Carlito da Costa. (2018). Sistem Pengelolaan Sampah Yang Berwawasan Lingkungan Dalam Upaya Menciptakan Kota Yang Berkelanjutan (Studi Tentang Sistem Pengelolaan Sampah Di Kota Semarang). Tesis: Unissula Semarang.

Devi Mulyasari. (2019). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung. Jurnal Adminsitrasi Negara, Vol. 13, No. 1, 1-15.

Juanda Elia Rembet, Jantje J. Tinangon, Treesje Runtu; 2018; “Analisis Efektivitas Penagihan Retribusi Persampahan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon”. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, Volume 13, Nomor 4, 2018.

Kamalludin; (2013); “Implementasi Kebijakan Retribusi Sampah di Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang”. Jurnal Reformasi, Volume 3, Nomor 1, Januari – Juni 2013.

Peraturan Perundang-Undang

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Pengolahan Sampah